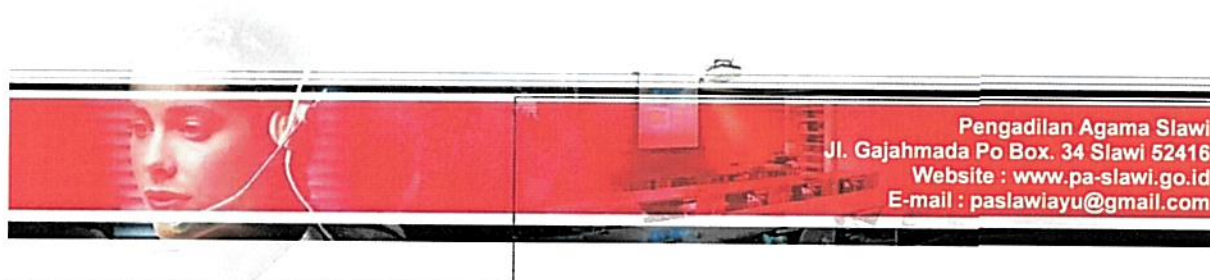


LAPORAN



PENYUSUNAN SURVEY KEPUASAN MASYARAKAT (SKM) PENGADILAN AGAMA SLAWI

**PERIODE TRIWULAN 3 (JULI-SEPTEMBER)
TAHUN 2023**



Pengadilan Agama Slawi
Jl. Gajahmada Po Box. 34 Slawi 52416
Website : www.pa-slawi.go.id
E-mail : paslawiayu@gmail.com

DAFTAR ISI

Daftar Isi	i
-------------------------	---

Bab I Pendahuluan

1.1 Latar belakang.....	I-1
1.2 Peraturan Perundangan	I-2
1.3 Maksud dan Tujuan.....	I-2
1.4 Sasaran	I-2
1.5 Ruang Lingkup.....	I-3
1.6 Manfaat	I-3
1.7 Indikator Penilaian.....	I-3

Bab II Teknis Pelaksanaan

2.1 Pengertian	II-1
2.2 Metodologi Penyusunan Survey Kepuasan Masyarakat	II-4

Bab III Profil dan Pembahasan:

3.1 Profil Organisasi.....	III-1
3.2 Profil Responden.....	III-4
3.3 Tingkat Kepuasan Masyarakat	III-5
3.4 Analisa Antara Persepsi dan Harapan	III-8
3.5 Kesimpulan Hasil Survey Kepuasan Masyarakat	III-10
3.6 Opini Responden.....	III-10
3.6 Saran terhadap Fasilitas.....	III-11

Bab IV Kesimpulan dan Saran

4.1 Kesimpulan	IV-1
4.2 Saran	IV-1

PENDAHULUAN



Pengadilan Agama Slawi

**Jl. Gajahmada Po Box. 34 Slawi 52416
Telp. (0283) 491048 | Fax. (0283) 491476**

Website : www.pa-slawi.go.id

E-mail : paslawiayu@gmail.com

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pelayanan publik merupakan suatu tindakan pemberian barang atau jasa kepada Pencari Keadilan oleh pemerintah, dalam rangka tanggung jawabnya kepada publik yang diberikan secara langsung dan dirasakan oleh Pencari Keadilan. Pelayanan publik harus diberikan kepada Pencari Keadilan karena adanya kepentingan publik (*public interest*), yang harus dipenuhi oleh pemerintah, karena pemerintahlah yang memiliki tanggung jawab untuk memenuhinya.

Dalam memberikan pelayanannya, pemerintah dituntut untuk memberikan sebuah pelayanan prima kepada publik, sehingga tercapai suatu kepuasan. Pelayanan prima merupakan suatu layanan yang diberikan kepada publik yang mampu memuaskan pihak yang dilayani, hal tersebut sebagaimana disebutkan dalam Undang- Undang Nomor : 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik dan Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Republik Indonesia Nomor : 63/KEP/M.PAN/7/2003 tentang Pedoman Umum Penyelenggaraan Pelayanan Publik.

Seiring dengan perubahan lingkungan strategis yang cepat dan luas di berbagai sektor, maka spesialisasi dan variasi tuntutan kebutuhanpun semakin meningkat dalam kegiatan dan kehidupan Pencari Keadilan. Ditambah lagi dengan peningkatan kesadaran bernegara, kesemuanya itu mengharuskan adanya perubahan tentang konsep pelayanan terhadap pencari keadilan. Pencari Keadilan semakindinamis dan semakin kritis, sehingga hal ini memicu adanya keharusan perubahan paradigma pemerintah dalam memberikan pelayanan kepada Pencari Keadilan.

Penyusunan Survey Kepuasan Pencari Keadilan (SKM) merupakan suatu langkah yang tepat untuk mengakomodasi harapan Pencari Keadilan, menilai tingkat kepuasan Pencari Keadilan terhadap kinerja pemerintah terutama aparat dan fasilitasnya serta sebagai alat untuk membuat program-program pemerintah yang efektif dan tepat sasaran.

1.2 Peraturan Perundangan

Dasar dari penyusunan SKM adalah peraturan perundangan sebagai berikut :

- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik.
- Undang-undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2000 tentang Program Pembangunan Nasional (PROPENAS).
- Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1995 tentang Perbaikan dan Peningkatan Mutu Pelayanan Aparatur Pemerintah Kepada Masyarakat.
- Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Republik Indonesia Nomor: 63/KEP/M.PAN/7/2003 tentang Pedoman Umum Penyelenggaraan Pelayanan Publik.
- Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 14 Tahun 2017 Tentang Pedoman Penyusunan Survey Kepuasan Masyarakat.

1.3 Maksud dan Tujuan

Penyusunan Survey Kepuasan Pencari Keadilan terhadap **Pengadilan Agama Slawi**, dimaksudkan sebagai kegiatan untuk mendapatkan suatu gambaran/pendapat masyarakat tentang kualitas pelayanan publik yang telah diberikan oleh **Pengadilan Agama Slawi**.

Selain itu kegiatan ini bertujuan untuk mengetahui tingkat kinerja **Pengadilan Agama Slawi**, baik oleh masyarakat maupun instansi/unit terkait sebagai bahan untuk menetapkan kebijakan dalam rangka peningkatan kualitas pelayanan publik selanjutnya.

1.4 Sasaran

Adapun sasaran dari Penyusunan Survey Kepuasan Pencari Keadilan ini adalah :

1. Terwujudnya tingkat kinerja Unit Pelayanan Publik Pengadilan Agama Slawi dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat;
2. Penataan sistem, mekanisme dan prosedur pelayanan, sehingga pelayanan

dapat dilaksanakan secara lebih berkualitas, berdaya guna dan berhasil guna;

3. Tumbuh kreativitas, prakarsa dan peran serta masyarakat dalam upaya peningkatan kualitas pelayanan publik.

1.5 Ruang Lingkup

Ruang lingkup kegiatan adalah pada seluruh proses pelayanan Pengadilan Agama Slawi .

1.6 Manfaat

Dengan tersedianya data SKM secara periodik, dapat diperoleh manfaat sebagai berikut :

1. Mengetahui kelemahan/kekurangan dari masing-masing unsur/indikator dalam penyelenggaraan pelayanan publik Unit Pelayanan Publik Pengadilan Agama Slawi.
2. Mengetahui kinerja penyelenggaraan pelayanan yang telah dilaksanakan oleh Unit Pelayanan Publik Pengadilan Agama Slawi secara periodik.
3. Sebagai bahan penetapan kebijakan yang perlu diambil dan upaya yang perlu dilakukan.
4. Mengetahui Survey Kepuasan Pencari Keadilan secara menyeluruh terhadap hasil pelaksanaan pelayanan publik Unit Pelayanan Publik Pengadilan Agama Slawi.
5. Memacu persaingan positif antar unit penyelenggara pelayanan pada lingkup Pemerintah Pusat dan Daerah dalam upaya peningkatan kinerja pelayanan.
6. Masyarakat dapat mengetahui gambaran tentang kinerja Unit Pelayanan Publik Pengadilan Agama Slawi.

1.7 Unsur/indikator Penilaian

Penyusunan Survey Kepuasan Pencari Keadilan ini mengacu pada **Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 14 Tahun 2017 Tentang Pedoman Penyusunan Survey Kepuasan Masyarakat** terdapat 10 unsur/indikator, namun untuk menyesuaikan pada pelayanan Pengadilan Agama Slawi maka unsur/indikator akan dirubah dengan tidak mengurangi kecukupan dari ketetapan peraturan tersebut.

Adapun 10 unsur/indikator yang dijadikan sebagai acuan pengukuran Survey Kepuasan Pencari Keadilan, yang meliputi :

1. Kesesuaian Persyaratan Pelayanan
2. Perilaku Petugas Pelayanan
3. Kemudahan Prosedur Pelayanan
4. Kecepatan Waktu dalam memberikan Pelayanan
5. Kesesuaian Prosedur Layanan dengan standar Pelayanan
6. Kewajaran Biaya/Tarif Pelayanan
7. Kompetensi/kemampuan petugas
8. Kesopanan Petugas Pelayanan
9. Kualitas sarana dan prasarana
10. Penanganan pengaduan pengguna layanan

TEKNIS PELAKSANAAN



Pengadilan Agama Slawi

Jl. Gajahmada Po Box. 34 Slawi 52416

Telp. (0283) 491048 | Fax. (0283) 491476

Website : www.pa-slawi.go.id

E-mail : paslawiyu@gmail.com

BAB II

TEKNIS PELAKSANAAN

2.1 Pengertian

2.1.1 Pengertian Umum

1. **Survey Kepuasan Pencari Keadilan (SKM) adalah** data dan informasi tentang tingkat kepuasan Pencari Keadilan yang diperoleh dari hasil pengukuran secara kuantitatif dan kualitas atas pendapat Pencari Keadilan dalam memperoleh pelayanan dari publik dengan membandingkan antara harapan dan kebutuhan.
2. **Penyelenggara pelayanan publik adalah** Instansi Pemerintah.
3. **Instansi Pemerintah adalah** Instansi Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah.
4. **Pelayanan publik adalah** segala kegiatan pelayanan yang dilaksanakan oleh penyelenggara pelayanan publik sebagai upaya pemenuhan kebutuhan penerima pelayanan, maupun dalam rangka pelaksanaan ketentuan peraturan perundang-undangan.
5. **Unit pelayanan publik adalah** unit kerja pelayanan yang berupa Pengadilan Agama Slawi yang secara langsung maupun tidak langsung memberikan pelayanan kepada penerima pelayanan.
6. **Pemberi pelayanan publik adalah** pegawai instansi Pengadilan Agama Slawi yang melaksanakan tugas dan fungsi pelayanan publik sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
7. **Penerimaan pelayanan publik adalah** orang, Pencari Keadilan yang menerima pelayanan dari aparaturnya penyelenggara pelayanan publik di Pengadilan Agama Slawi.
8. **Kepuasan pelayanan adalah** hasil pendapat dan penilaian orang, Pencari Keadilan, Pencari Keadilan, Para Pihak Berperkara terhadap kinerja

- pelayanan yang diberikan oleh aparatur penyelenggara pelayanan publik di Pengadilan Agama Slawi.
9. **Biaya pelayanan publik adalah** segala biaya (dengan nama atau sebutan apapun) sebagai imbal jasa atas pemberian pelayanan publik di Pengadilan Agama Slawi, yang besaran dan tata cara pembayarannya ditetapkan oleh pejabat yang berwenang sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
 10. **Unsur pelayanan adalah** faktor atau aspek yang terdapat dalam penyelenggaraan pelayanan kepada Pencari Keadilan sebagai variabel penyusunan Survey Kepuasan Pencari Keadilan untuk mengetahui kinerja Pengadilan Agama Slawi.
 11. **Responden adalah** penerima pelayanan publik yang pada saat pencacahan sedang berada di lokasi unit pelayanan dan telah menerima pelayanan dari aparatur penyelenggara pelayanan Pengadilan Agama Slawi.

2.1.2 Unsur Survey Kepuasan Pencari Keadilan

A. Pengertian 9 Unsur Utama Pelayanan

Penyusunan Survey Kepuasan Pencari Keadilan ini mengacu pada **Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 14 Tahun 2017 Tentang Pedoman Penyusunan Survey Kepuasan Masyarakat** terdapat 9 unsur/indikator, namun untuk menyesuaikan pada pelayanan Pengadilan Agama Slawi maka unsur/indikator akan dirubah dengan tidak mengurangi kecukupan dari ketetapan peraturan tersebut.

Adapun 9 unsur/indikator yang dijadikan sebagai acuan pengukuran Survey Kepuasan Pencari Keadilan, yang meliputi :

1. **Persyaratan**, yaitu syarat yang harus dipenuhi dalam pengurusan suatu jenis pelayanan, baik persyaratan teknis maupun administratif;
2. **Sistem, mekanisme, prosedur**, yaitu tata cara pelayanan yang dibakukan bagi pemberi dan penerima pelayanan, termasuk pengaduan;
3. **Waktu penyelesaian**, yaitu jangka waktu yang diperlukan untuk menyelesaikan seluruh proses pelayanan dari setiap jenis

- pelayanan;
4. **Biaya/tarif**, yaitu ongkos yang dikenakan kepada penerima layanan dalam mengurus dan/atau memperoleh pelayanan dari penyelenggara yang besarnya ditetapkan berdasarkan kesepakatan penyelenggara dan masyarakat;
 5. **Produk spesifikasi jenis pelayanan**, yaitu hasil pelayanan yang diberikan dan diterima sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan;
Produk pelayanan ini merupakan hasil dari setiap spesifikasi jenis pelayanan.
 6. **Kompetensi pelaksana**, yaitu kemampuan yang harus dimiliki oleh pelaksana meliputi pengetahuan, keahlian, keterampilan dan pengalaman;
 7. **Perilaku pelaksana**, yaitu sikap petugas dalam memberikan pelayanan;
 8. **Penanganan pengaduan, saran dan masukan**, yaitu tata cara pelaksanaan penanganan pengaduan dan tindak lanjut;
 9. **Kesopanan petugas pelayanan**, yaitu sikap dan perilaku petugas dalam memberikan pelayanan kepada Pencari Keadilan secara sopan sertasaling menghargai dan menghormati;

2.1.3 Pengertian Khusus

1. **Tempat Parkir** adalah sebagian tempat atau wilayah atau lokasi di unit pelayanan yang digunakan untuk memarkir kendaraan yang dibawa oleh pengunjung selama proses pelayanan berlangsung.
2. **Ruang Tunggu** adalah suatu tempat atau ruangan di unit pelayanan yang berfungsi sebagai tempat pengunjung dalam menunggu antrian untuk mendapatkan pelayanan.
3. **Ruang Pelayanan** adalah suatu tempat atau ruangan di unit pelayanan yang berfungsi sebagai tempat berlangsungnya proses pelayanan.
4. **Toilet** adalah ruangan yang digunakan sebagai tempat untuk melakukan aktifitas seperti cuci tangan dan muka dan/atau kamar kecil (kakus).

2.2 Metodologi Penyusunan Survey Kepuasan Pencari Keadilan

2.2.1. Persiapan

Persiapan yang dilakukan oleh Tim Survey Kepuasan Pencari Keadilan meliputi;

a. Penyusunan kuisisioner

Kuisisioner dibagi atas 6 (enam) bagian yaitu :

Bagian I : Identitas unit pelayanan, termasuk jenis pelayanan yang dilakukan oleh responden

Bagian II : Identitas responden, meliputi : usia, jenis kelamin, pendidikan dan pekerjaan, jumlah kunjungan yang berguna untuk menganalisis profil responden dalam penilaiannya terhadap unit pelayanan instansi pemerintah

Bagian III : Mutu pelayanan publik, pendapat penerima pelayanan yang memuat kesimpulan atau pendapat responden terhadap unsur-unsur pelayanan yang dinilai.

Bagian IV : Persepsi dan harapan terhadap mutu pelayanan publik, pendapat penerima pelayanan dengan pemberian suatu nilai dengan range nilai tertentu terhadap unsur-unsur pelayanan yang ditanyakan.

Bagian V : Identitas pencacah, berisi data pencacah (apabila kuisisioner diisi oleh Pencari Keadilan, bagian ini tidak diisi).

Bagian VI : Saran/opini/pendapat responden terhadap unit pelayanan.

b. Penyusunan bentuk jawaban

1. Survey Kepuasan Pencari Keadilan

Bentuk jawaban untuk menentukan SKM melalui pertanyaan dari setiap unsur pelayanan secara umum mencerminkan tingkat kualitas pelayanan pada Pengadilan Agama Slawi mulai dari kategori sangat baik sampai dengan tidak baik.

Untuk kategori **tidak baik** diberi nilai **persepsi 1**, **kurang baik** dari nilai **persepsi 2**, **baik** diberi nilai **persepsi 3**, **sangat baik** diberi nilai **persepsi 4**.

Contoh :

Penilaian terhadap unsur prosedur pelayanan :

- Diberi nilai 1 (tidak mudah) apabila dalam mendapatkan informasi pelayanan tidak tersedia di seluruh media.
- Diberi nilai 2 (kurang mudah) apabila dalam mendapatkan informasi pelayanan sudah tersedia namun masih belum mudah mendapatkannya.
- Diberi nilai 3 (mudah) apabila pelaksanaan dalam mendapatkan informasi pelayanan sudah tersedia namun kurang up to date dan masih perlu diefektifkan.
- Diberi nilai 4 (sangat mudah) apabila dalam mendapatkan informasi pelayanan sangat mudah, tersedia dibanyak media informasi dan up to date.

2. Persepsi dan Harapan

Responden diminta untuk memberikan suatu nilai terhadap mutu pelayanan unit pelayanan publik sesuai dengan persepsi dan harapannya. Range nilai jawaban adalah **1 (satu)** sampai **4 (empat)**. Maksud dari nilai persepsi adalah nilai yang diberikan oleh responden terhadap persepsi/ yang dirasakan responden terhadap mutu pelayanan saat ini di unit terkait.

Maksud dari nilai harapan adalah nilai yang diberikan oleh responden terhadap keinginan/harapan responden terhadap mutu pelayanan yang ideal di unit terkait.

3. Saran Perbaikan

Responden diminta untuk memberikan saran perbaikan kepada Pengadilan Agama Slawi, sehingga diharapkan dapat meningkatkan kinerja dari Pengadilan Agama Slawi.

c. Penetapan responden dan lokasi

i. Jumlah responden

Responden dipilih secara acak (*purposive sampling*) yang ditentukan sesuai dengan cakupan wilayah Pengadilan Agama Slawi. Untuk memenuhi akurasi hasil penyusunan survey, jumlah minimal responden terpilih ditetapkan dari jumlah populasi penerima layanan, dengan dasar:

$$S = (\lambda^2 \cdot N \cdot P \cdot Q) / (d^2 (N-1) + \lambda^2 \cdot P \cdot Q)$$

ii. Lokasi dan waktu pengumpulan data

Pengumpulan data dilakukan di Pengadilan Agama Slawi pada jam kerja terhadap responden yang telah menerima pelayanan Pengadilan Agama Slawi dengan proporsional terhadap waktu banyaknya pengunjung.

iii. Target responden

Secara garis besar target responden adalah Pencari Keadilan yang telah berkunjung ke Pengadilan Agama Slawi dan telah mendapat pelayanan dari Pengadilan Agama Slawi.

d. Penyusunan Jadwal

Pelaksanaan survey dimulai pada bulan Juli hingga September 2023.

2.2.2. Pengumpulan data

Dari jumlah responden yang telah ditetapkan, dilakukan pengumpulan informasi dengan cara acak dengan metode wawancara mengenai unsur pelayanan yang telah ditetapkan dan saran perbaikan terhadap pelayanan di Pengadilan Agama Slawi.

Selain itu dilakukan pengumpulan data internal untuk memahami mengenai visi, misi, program, serta profil pelayanan publik dan pengunjung Pengadilan Agama Slawi.

2.2.3. Pengolahan Data

Nilai SKM dihitung dengan menggunakan “nilai rata-rata tertimbang” masing-masing unsur pelayanan. Dalam perhitungan Survey Kepuasan Pencari Keadilan terhadap misal 10 unsur pelayanan yang dikaji, setiap unsur pelayanan memiliki penimbang yang sama dengan rumus sebagai berikut:

$$\text{Bobot nilai rata-rata tertimbang} = \frac{\text{Jumlah bobot}}{\text{Jumlah unsur}} = \frac{1}{10} = 0,1$$

Untuk memperoleh nilai SKM unit pelayanan digunakan pendekatan nilai rata-rata tertimbang dengan rumus sebagai berikut:

$$\text{IKM} = \frac{\text{Jumlah Bobot Nilai}}{\text{Skala Maksimum Penilaian}} \times 100$$

Mengingat unit pelayanan mempunyai karakteristik yang berbeda-beda, maka setiap unit pelayanan dimungkinkan untuk:

- Menambah unsur yang dianggap relevan
- Memberikan bobot yang berbeda terhadap 10 unsur yang dominan dalam unit pelayanan, dengan catatan jumlah bobot seluruh unsur tetap 1

2.2.4. Analisa Data

Data yang telah masuk, akan dianalisa secara manual maupun dengan menggunakan software statistik seperti Minitab atau SPSS. Pengolahan data akan menghasilkan output:

Nilai Survey Kepuasan Pencari Keadilan (SKM) :

NILAI PERSEPSI	NILAI INTERVAL SKM	NILAI INTERVAL KONVERSI SKM	MUTU PELAYANAN	KINERJA UNIT PELAYANAN
1	25,00 - 43,75	25,00-64,99	D	Sangat Tidak Memuaskan
2	43,76 - 62,50	65,00-76,60	C	Tidak Memuaskan
3	62,51 - 81,25	76,61-88,30	B	Memuaskan
4	81,26 - 100,00	88,31-100,00	A	Sangat Memuaskan

Output lain yang dihasilkan adalah Diagram Matriks Persepsi dan Harapan Responden (Diagram Importance & Performance Matrix).

Tinggi/High

KEPENTINGAN / IMPORTANCE

<p><i>Berpengaruh Tinggi / High Leverage</i></p> <p>Kuadran I</p> <p>Kategori : Perbaikan / Improve</p>	<p>Kuadran II</p> <p>Kategori : Pemeliharaan / Maintain</p>
<p>Kuadran III :</p> <p>Kategori : Pemeliharaan / Maintain</p>	<p>Kuadran IV</p> <p>Kategori : Peninjauan Ulang / De-emphasize</p> <p><i>Berpengaruh Rendah/Low Leverage</i></p>

Rendah/Low

HASIL KERJA/PERFORMANCE

Kuadran I : merupakan wilayah yang memuat faktor-faktor yang dianggap penting oleh pelanggan tetapi pada kenyataannya faktor-faktor ini belum sesuai dengan harapan pelanggan (tingkat kepuasan yang diperoleh sangat rendah). Variabel-variabel yang masuk dalam kuadran ini harus ditingkatkan. Caranya adalah organisasi melakukan perbaikan secara terus-menerus sehingga hasil kerja/performance unsur pelayanan yang ada dalam kuadran ini akan

meningkat.

- Kuadran II : merupakan wilayah yang memuat faktor-faktor yang dianggap penting oleh pelanggan sudah sesuai dengan yang dirasakan sehingga tingkat kepuasannya relatif lebih tinggi. Variabel-variabel yang masuk dalam kuadran ini harus tetap dipertahankan karena semua variabel ini menjadikan unsur tersebut unggul dimata pelanggan.
- Kuadran III : merupakan wilayah yang memuat faktor-faktor yang dianggap kurang penting oleh pelanggan dan pada kenyataannya kinerjanya tidak terlalu istimewa. Peningkatan variabel-variabel yang termasuk dalam kuadran ini dapat dipertimbangkan kembali karena pengaruhnya terhadap manfaat yang dirasakan oleh pelanggan sangat kecil.
- Kuadran IV : merupakan wilayah yang memuat factor-faktor yang dianggap kurang penting oleh pelanggan dan dirasakan terlalu berlebihan. Variabel-variabel yang masuk dalam kuadran ini dapat dikurangi agar organisasi dapat melakukan penghematan terutama dalam hal penghematan biaya.

2.2.5. Evaluasi dan Program

Tahapan akhir berisi kesimpulan terhadap hasil SKM Pengadilan Agama Slawi. Tim Survey Kepuasan Pencari Keadilan akan memberikan saran rekomendasi tindak lanjut yang harus dilakukan terutama pada unsur-unsur yang mempunyai nilai kurang baik, sehingga diharapkan dapat meningkatkan kinerja pelayanan Pengadilan Agama Slawi kepada Pencari Keadilan.

PROFIL DAN PEMBAHASAN



Pengadilan Agama Slawi

Jl. Gajahmada Po Box. 34 Slawi 52416

Telp. (0283) 491048 | Fax. (0283) 491476

Website : www.pa-slawi.go.id

E-mail : paslawiayu@gmail.com

BAB III

PROFIL DAN PEMBAHASAN

Pada tahun 2023 triwulan 3 (Juli-September) dilakukan Survey Kepuasan Masyarakat pada Pengadilan Agama Slawi. Survey ini mendapat respon positif dari masyarakat yang mengharapkan adanya perbaikan kinerja pelayanan dari unit pelayanan.

Berikut pembahasan mengenai pelayanan pada Pengadilan Agama Slawi yang telah dihimpun oleh surveyor TIM SURVEY KEPUASAN MASYARAKAT :

3.1 Profil Organisasi

Nama Instansi	: Pengadilan Agama Slawi
Alamat	: Jl. Gajahmada Po Box. 34, Slawi 52416
No. Telp/Fax	: (0283) 491 048 / (0283) 491476
Waktu Pelayanan	: 08.00 — 16.30 WIB (Senin — Kamis) 07.30 — 16.30 WIB (Jum'at)
Jenis Pelayanan	: Pelayanan Pengadilan Agama Slawi, meliputi : 1. Lihat pada Manual Mutu
Biaya Pelayanan	: Biaya perkara ditetapkan sesuai dengan SK Panjar Perkara
Persyaratan Administrasi	: Tergantung pada jenis pelayanan
Jumlah Pengunjung	: ± 50 - 100 orang/hari
Visi Misi	:

Visi

“Terwujudnya Pengadilan Agama Slawi Yang Agung”.

Misi :

1. Memberikan pelayanan kepada masyarakat pencari keadilan dengan mengacu kepada azas sederhana, cepat, dan biaya ringan;
2. Meningkatkan profesionalisme aparatur Pengadilan Agama Slawi

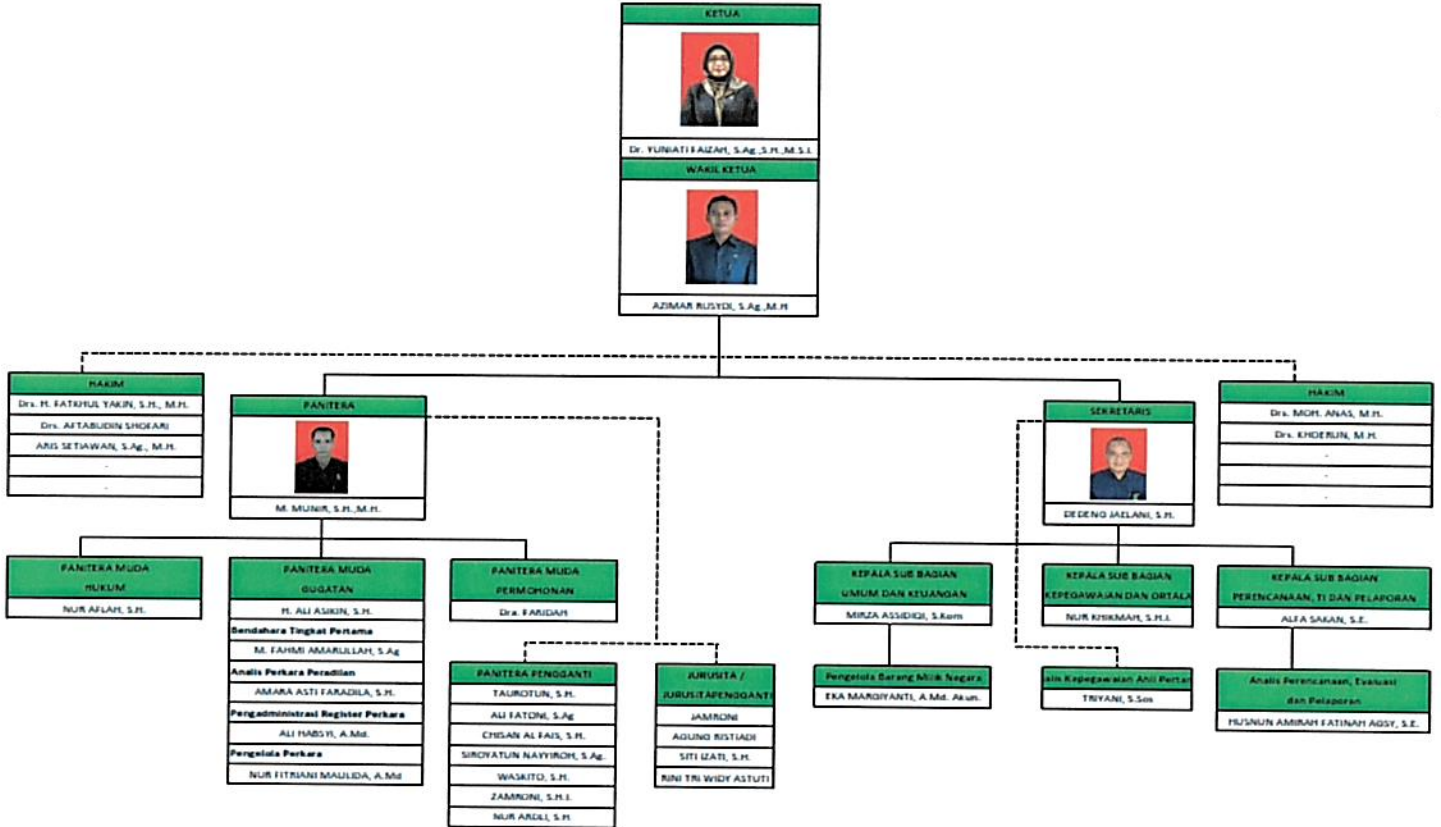
3. Meningkatkan penyelenggaraan manajemen peradilan dan administrasi umum.
4. Meningkatkan kredibilitas dan transparansi penyelenggaraan tugas dan kewenangan Pengadilan Agama Slawi.

Alur Pelayanan :

Lihat Pada Lampiran Manual Mutu

Struktur Organisasi :

STRUKTUR ORGANISASI PENGADILAN AGAMA SLAWI KELAS 1A



3.2 Profil Responden

3.2.1 Pelayanan

Pengadilan Agama Slawi memberikan pelayanan survey tahun 2023 triwulan 3 (Juli-September) dengan sebagian besar responden adalah responden yang melakukan pendaftaran yaitu sebesar **56,29%** dari seluruh total responden. Rincian responden yang mengikuti survey berdasarkan pengguna jenis pelayanan dapat dilihat pada **Tabel 3.1**

TABEL 3.1 PERSENTASE RESPONDEN PENGADILAN AGAMA SLAWI BERDASARKAN PENGGUNA JENIS PELAYANAN

Jenis Pelayanan	Persentase (%)
1. Informasi/Pengaduan	2,86
2. Pendaftaran	56,29
3. Pengambilan Produk	40,86
4. Lainnya	0,00
Total	100,00

Catatan : Warna biru menunjukkan persentase terbesar pada pengguna jenis pelayanan

3.2.2 Karakteristik Responden

TABEL 3.2 PERSENTASE KARAKTERISTIK RESPONDEN PENGADILAN AGAMA SLAWI

No	Karakteristik	Dominasi	
		Keterangan	Persentase (%)
1.	Umur	< 20 Th	2,29
		20 - 29 Th	36,86
		30 - 39 Th	38,29
		40 - 49 Th	16,57
		> 49 Th	6,00
2.	Jenis Kelamin	Laki-laki	29,71
		Perempuan	70,29

No	Karakteristik	Dominasi	
		Keterangan	Persentase (%)
3.	Pendidikan Terakhir	SD ke bawah	20,57
		SLTP	36,57
		SLTA	41,14
		Diploma (D1/D2/D3/D4)	0,00
		Sarjana (S1)	1,71
4.	Pekerjaan	PNS/TNI/POLRI	0,86
		Pegawai Swasta	22,00
		Wiraswasta	24,29
		Pelajar/Mahasiswa	0,00
		Lainnya	52,86

Dominasi masing-masing karakteristik responden pada Pengadilan Agama Slawi dapat dilihat pada **Tabel 3.2**. Karakteristik responden yang mewakili pengunjung Pengadilan Agama Slawi secara keseluruhan perlu mendapat perhatian secara khusus, sehingga diharapkan dengan mengetahui tipe mayoritas pengunjung. Pengadilan Agama Slawi dapat mempersiapkan strategi dan pelayanan yang spesifik.

3.3 Tingkat Kepuasan Masyarakat

Hasil penyusunan Survey Kepuasan Masyarakat pada Pengadilan Agama Slawi pada **tahun 2023** triwulan 3 (Juli-September) mempunyai kategori **Sangat Baik**, yaitu dengan nilai rata-rata tertimbang SKM adalah **3,84** atau konversi IKM sebesar **95,95**.

$$\text{IKM} = 3,84 \times 25 = 95,95$$

Berikut adalah tabel nilai persepsi, interval IKM, interval konversi IKM, mutu pelayanan dan kinerja unit pelayanan menurut Permenpan RB No 14 tahun 2017 :

NILAI PERSEPSI	NILAI INTERVAL SKM	NILAI INTERVAL KONVERSI SKM	MUTU PELAYANAN	KINERJA UNIT PELAYANAN
1	1,00-2,59	25,00-64,99	D	Tidak baik
2	2,60-3,06	65,00-76,60	C	Kurang baik
3	3,06-3,53	76,61-88,30	B	Baik
4	3,53-4,00	88,31-100,00	A	Sangat baik

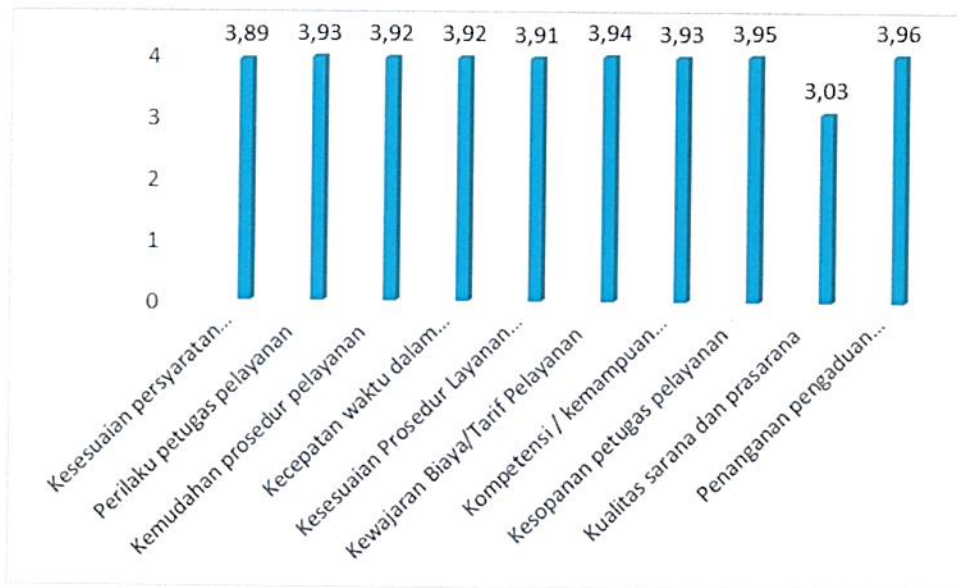
Berbagai unsur yang terkandung dalam kuisioner dapat dijadikan suatu acuan untuk melihat sistem pelayanan, dan secara rinci dapat dijadikan suatu pedoman perbaikan kinerja. Sehingga dari indeks per unsur ini dapat digunakan untuk melihat kekurangan dari sistem di suatu unit kerja, keluhan masyarakat, hal-hal yang harus diutamakan, unsur yang harus ditingkatkan dan harus dipertahankan.

Ada dua hal penting yang harus diutamakan dalam memaksimalkan kinerja di sektor pelayanan publik. Pertama adalah indikator efisiensi yang dapat dilihat dari mudahnya mendapatkan informasi pelayanan oleh masyarakat, kecepatan pelayanan dan biaya yang terjangkau oleh masyarakat. Kedua adalah indikator sufisiensi yang dapat dilihat dari bagaimana menyikapi keluhan dari masyarakat, tidak terdapatnya diskriminasi dalam pelayanan serta pelayanan yang ada memang dibutuhkan oleh masyarakat.

**TABEL 3.3 NILAI RATA-RATA UNSUR PELAYANAN
PENGADILAN AGAMA SLAWI**

No.	Unsur Pelayanan	Nilai Unsur Pelayanan	Mutu Pelayanan
1	Kesesuaian persyaratan pelayanan	3,89	Sangat Baik
2	Perilaku petugas pelayanan	3,93	Sangat Baik
3	Kemudahan prosedur pelayanan	3,92	Sangat Baik
4	Kecepatan waktu dalam memberikan pelayanan	3,92	Sangat Baik
5	Kesesuaian produk pelayanan	3,91	Sangat Baik
6	Kewajaran biaya / tarif pelayanan	3,94	Sangat Baik
7	Kompetensi / kemampuan petugas	3,93	Sangat Baik
8	Kesopanan petugas pelayanan	3,95	Sangat Baik
9	Kualitas sarana dan prasarana	3,03	Baik
10	Penanganan pengaduan pengguna layanan	3,96	Sangat Baik
Rata-rata tertimbang		3,84	Sangat Baik

SURVEY KEPUASAN MASYARAKAT



GRAFIK 3.4 NILAI RATA-RATA UNSUR PELAYANAN PADA UNIT PELAYANAN PENGADILAN AGAMA SLAWI

Berdasarkan Tabel 3.3 dan Grafik 3.1 menunjukkan bahwa dari 10 unsur pelayanan sudah sangat baik, 1 unsur pelayanan memiliki kualitas pelayanan yang sudah baik dan 9 unsur pelayanan memiliki kualitas yang sangat baik. Unsur pelayanan yang dinilai masyarakat memiliki kualitas sangat baik adalah unsur Kesesuaian persyaratan pelayanan, Perilaku petugas pelayanan, Kemudahan prosedur pelayanan, Kecepatan waktu dalam memberikan pelayanan, Kesesuaian prosedur layanan dengan standar pelayanan, Kewajaran biaya/tarif pelayanan, Kompetensi/kemampuan petugas, Kesopanan petugas pelayanan, dan Penanganan pengaduan pengguna layanan.

3.4 Analisa Antara Persepsi dan Harapan

Pada periode survey ini, dilakukan pencarian data yang lebih mendalam terhadap persepsi dan harapan responden terhadap mutu pelayanan unit pelayanan publik, sehingga dapat diketahui unsur-unsur pelayanan yang menjadi prioritas untuk ditingkatkan.

Analisa persepsi dan harapan dapat melihat seberapa besar harapan/kepentingan pelanggan dan persepsi/pendapat pelanggan atas keadaan suatu unsur pelayanan saat ini. Keadaan persepsi dan harapan pelanggan dapat dilihat melalui matriks, dimana matriks tersebut terdiri dari 4 kuadran, yaitu **Kuadran I** : *Attributes to Improve*, **Kuadran II** : *Attributes to Maintain*, **Kuadran III** : *Attributes to Maintain*, **Kuadran IV** : *Attributes to De-emphasize*.

KUADRAN I U8	KUADRAN II U4 U2
KUADRAN III U5 U9	KUADRAN IV U1 U3 U6, U7, U10

GAMBAR 3.6 DIAGRAM MATRIKS PERSEPSI DAN HARAPAN PELANGGAN DI PENGADILAN AGAMA SLAWI

TABEL 3.6 VARIABEL-VARIABEL PADA TIAP-TIAP KUADRAN

Kuadran	Variabel	
I	U8	= Kualitas sarana dan prasarana
II	U2	= Perilaku Petugas Pelayanan
	U4	= Kecepatan Waktu Pelayanan
III	U5	= Kesesuaian Produk pelayanan
	U9	= Kewajaran biaya/tarif Pelayanan
IV	U10	= Penanganan pengaduan pengguna layanan
	U1	= Kesesuaian Persyaratan Pelayanan
	U3	= Kemudahan Prosedur Pelayanan
	U6	= Kompetensi/kemampuan petugas
	U7	= Kesopanan Petugas Pelayanan

Dari hasil diagram tersebut dapat dibuat suatu strategi untuk meningkatkan kepuasan pelanggan. Strategi tersebut dibuat berdasarkan posisi masing-masing variabel dalam kuadran.

Terdapat 1 unsur pelayanan yang masuk dalam Kuadran I. Seperti yang telah dijelaskan sebelumnya bahwa unsur-unsur yang terdapat di Kuadran I merupakan unsur-unsur yang dinilai masyarakat memiliki kualitas pelayanan yang masih rendah namun harapan masyarakat terhadap kualitas pelayanan unsur tersebut tinggi sehingga pada unsur-unsur yang masuk di Kuadran I perlu dilakukan perbaikan.

Unsur-unsur yang diprioritaskan untuk dilakukan perbaikan antara lain :

No	Prioritas Unsur	Program/Kegiatan	Waktu				PIC
			Jul	Ags	Sept	Okt	
1	U8	Pengkajian ulang sarana dan prasarana pelayanan publik	√			√	Ketua APM

Semua unsur tersebut berdasarkan persepsi masyarakat sudah baik. Namun hal tersebut masih belum sesuai dengan harapan masyarakat yang menginginkan pelayanan yang lebih baik dari kualitas pelayanan yang diberikan saat ini.

3.5 Kesimpulan Hasil Survey Kepuasan Masyarakat

Berdasarkan hasil pengukuran Survey Kepuasan Masyarakat pada Pengadilan Agama Slawi pada periode tahun 2023 triwulan 3 (Juli-September) didapatkan kesimpulan sebagai berikut :

No.	Kesimpulan	Keterangan
1.	Nilai IKM	95,95
2.	Kategori	Sangat Baik
3.	Unsur Terendah	U9 : Kualitas sarana dan prasarana
4.	Unsur Tertinggi	U10: Penanganan pengaduan pengguna Layanan U8 : Kesopanan Petugas Pelayanan U6 : Kewajaran Biaya/Tarif Pelayanan U2 : Perilaku Petugas Pelayanan U7 : Kompetensi / kemampuan petugas U3 : Kemudahan Prosedur Pelayanan U4 : Kecepatan Waktu Pelayanan U5 : Kesesuaian Prosedur Layanan U1 : Kesesuaian Persyaratan Pelayanan
5.	Prioritas Perbaikan	U9 : Kualitas sarana dan prasarana

3.6 Opini Responden

Untuk memotivasi dan memperbaiki kinerja suatu unit pelayanan pemerintah yang peduli untuk memberikan yang terbaik untuk masyarakat, maka masukan/opini/pendapat masyarakat sangat diperlukan. Selama pelaksanaan survey, surveyor menampung masukan/opini/pendapat dari masyarakat dengan harapan aspirasi dari masyarakat dapat diakomodir demi kemajuan bersama. Beberapa opini masyarakat dapat digunakan untuk memperbaiki unsur-unsur pelayanan yang dianggap kurang oleh masyarakat.

Berikut adalah masukan/opini/pendapat dari responden terhadap pelayanan Pengadilan Agama Slawi :

1. Kesopanan petugas dalam memberikan pelayanan diharapkan dapat ditingkatkan kembali

3.7 Saran terhadap Fasilitas

Berikut ini saran-saran yang disampaikan masyarakat terhadap fasilitas di Pengadilan Agama Slawi.

Tabel 3.7 Saran terhadap Pengadilan Agama Slawi

No.	Opini/Pendapat Responden
1.	Perlunya penambahan ruang tunggu bagi pengunjung
2.	Tempat parkir sepeda motor pengunjung perlu dilengkapi kanopi

KESIMPULAN & SARAN



Pengadilan Agama Slawi
Jl. Gajahmada Po Box. 34 Slawi 52416
Telp. (0283) 491048 | Fax. (0283) 491476
Website : www.pa-slawi.go.id
E-mail : paslawiayu@gmail.com

BAB IV

KESIMPULAN DAN SARAN

1.1 Kesimpulan

Berdasarkan analisa terhadap hasil pengolahan survei Kepuasan Masyarakat pada Pengadilan Agama Slawi maka kesimpulan yang dapat diambil adalah sebagai berikut :

1. Hasil penyusunan Kepuasan Masyarakat pada Pengadilan Agama Slawi tahun 2023 triwulan 3 (Juli-September) menunjukkan kategori **Sangat baik**, yaitu dengan nilai rata-rata tertimbang IKM **3,84** atau konversi IKM **95,95**.
2. Hasil pengolahan Kepuasan Masyarakat memberikan informasi bahwa :
Unsur – unsur pelayanan tertinggi dari hasil survey adalah :
 - U10: Penanganan pengaduan pengguna layanan
 - U8 : Kesopanan Petugas Pelayanan
 - U6 : Kewajaran biaya / tarif Pelayanan
 - U2 : Perilaku Petugas Pelayanan
 - U7 : Kompetensi / kemampuan petugas
 - U3 : Kemudahan Prosedur Pelayanan
 - U4 : Kecepatan Waktu Pelayanan
 - U5 : Kesesuaian Prosedur Layanan dengan Standar Pelayanan
 - U1 : Kesesuaian Persyaratan Pelayanan
 - U9 : Kualitas Sarana dan Prasarana

1.2 Saran

Adapun saran yang dapat diberikan berdasarkan analisa data yang diperoleh pada survei tahun 2023 triwulan 3 (Juli-September):

1. Berdasarkan hasil analisa persepsi dan harapan pelanggan, maka unsur-unsur yang perlu mendapat prioritas perbaikan, yaitu :
 - a. U9 : Kualitas sarana dan prasarana
 - b. Perlunya penambahan ruang tunggu serta atap/kanopi tempat parkir sepeda motor pengunjung. Dengan demikian diharapkan pelayanan yang

diberikan dapat memenuhi harapan pelanggan secara tersurat maupun tersirat.

2. Survei Kepuasan Masyarakat dilakukan sebaiknya secara periodik baik secara internal maupun eksternal, untuk memantau kondisi pelayanan dan persepsi masyarakat terhadap perbaikan yang telah dilakukan.
3. Untuk menjaga mutu pelayanan, disarankan Sistem Manajemen APM Pengadilan Agama Slawi terus diterapkan secara efektif dan konsisten serta melakukan perbaikan secara berkesinambungan.

Slawi, 02 Oktober 2023
Ketua Tim ZI
Pengadilan Agama Slawi



AZIMAR RUSYDI